

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

 <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p>	 <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p>	 <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p>	 <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,	BUPATI PENAJAM PASER UTARA,	BUPATI PENAJAM PASER UTARA,	BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan	Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan	Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan	Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan

<p>Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, diperlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan</p>	<p>Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan</p>	<p>wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan berdasarkan kajian dari lembaga resmi, perlu dilakukan penyesuaian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;</p>	<p>wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan berdasarkan kajian dari lembaga resmi, perlu dilakukan penyesuaian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;</p> <p>b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan</p>
--	--	---	---

<p>Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;</p>	<p>Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;</p>		<p>Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud b. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di

<p>Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan</p>	<p>Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan</p>	<p>Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat</p>	<p>Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>
---	---	---	--

<p>dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19);</p>	<p>dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19);</p>	<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19);</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p>
---	---	---	--

	<p>7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 61);</p>	<p>7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 4);</p>	<p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19);</p> <p>7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 61) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun</p>
--	--	--	--

			2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 36);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
	Pasal I Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

	<p>Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 61) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Tahun 2017 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 4) sebagai berikut:</p>	<p>Tahun 2017 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 36) diubah sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 	<p>Pasal 1: Tetap</p>	<p>Pasal 1: Tetap</p>	<p>Pasal 1: Tetap</p>

<p>3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.</p> <p>5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan Komunikasi insentif,</p>			
---	--	--	--

<p>Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.</p> <p>8. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>9. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.</p> <p>11. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada</p>			
---	--	--	--

<p>Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>12. Tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah.</p> <p>13. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua,</p>			
---	--	--	--

<p>Sekretaris, Anggota dalam alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.</p> <p>14. Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.</p> <p>15. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>16. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah</p>			
--	--	--	--

<p>tangga bagi pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD.</p> <p>17.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.</p> <p>18.Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.</p> <p>19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan</p>			
--	--	--	--

<p>tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>			
<p>Pasal 2 (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan yang pajaknya dibebankan pada APBD terdiri atas:</p> <p>a. Uang representasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua, setara dengan gaji pokok Bupati; 2. Wakil Ketua, sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD; 3. Anggota, sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD; <p>b. Tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil</p>	<p>Pasal 2: Tetap</p>	<p>Pasal 2: Tetap</p>	<p>Pasal 2: Tetap</p>

<p>negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan;</p> <p>e. Tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan;</p> <p>f. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:</p>			
---	--	--	--

<p>1. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan Jabatan ketua DPRD;</p> <p>2. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan Jabatan ketua DPRD;</p> <p>3. Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan Jabatan ketua DPRD; dan</p> <p>4. Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan Jabatan ketua DPRD.</p> <p>(2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan yang pajaknya dibebankan pada yang bersangkutan terdiri atas :</p> <p>a. Tunjangan Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD;</p>			
---	--	--	--

<p>b. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.</p>			
<p>Pasal 3 (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas : a. Jaminan kesehatan; b. Jaminan kecelakaan kerja; c. Jaminan kematian; dan d. Pakaian dinas dan atribut. (2) Jaminan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jaminan Kesehatan termasuk istri dan anak diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan atau <i>medical check up</i></p>	<p>Pasal 3: Tetap</p>	<p>Pasal 3: Tetap</p>	<p>Pasal 3: Tetap</p>

<p>dengan besaran biaya maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam provinsi serta tidak termasuk istri dan anak.</p> <p>(4) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuraan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pakaian Dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan Standarisasi Belanja Pegawai</p>			
---	--	--	--

<p>Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <p>a. rumah negara dan perlengkapannya;</p> <p>b. kendaraan dinas jabatan; dan</p> <p>c. belanja rumah tangga.</p> <p>(2) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap bulan</p>	<p>Pasal 4: Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <p>a. rumah negara dan perlengkapannya;</p> <p>b. kendaraan dinas jabatan; dan</p> <p>c. belanja rumah tangga.</p> <p>(2) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap bulan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <p>a. rumah negara dan perlengkapannya;</p> <p>b. kendaraan perorangan dinas; dan</p> <p>c. belanja rumah tangga.</p> <p>(2) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap bulan.</p>

<p>sebesar Ketua, Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Wakil Ketua, Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).</p> <p>(4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pimpinan DPRD.</p> <p>(5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.</p>		<p>sebesar Ketua, Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Wakil Ketua, Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).</p> <p>(4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pimpinan DPRD.</p> <p>(5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.</p>	<p>(4) Besaran Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni:</p> <p>a. Ketua DPRD sebesar Rp40.274.000,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) setiap bulan; dan</p> <p>b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp30.120.000,00 (tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.</p> <p>(5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.</p>
<p>Pasal 5</p> <p>(1) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <p>a. rumah negara dan Perlengkapannya; dan</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <p>a. rumah negara dan Perlengkapannya; dan</p> <p>b. tunjangan transportasi.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Selain Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan Tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <p>a. rumah negara dan perlengkapannya; dan</p> <p>b. tunjangan transportasi.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(5) Selain Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan Tunjangan kesejahteraan berupa:</p> <p>a. rumah negara dan perlengkapannya; dan</p> <p>b. tunjangan transportasi.</p>

<p>b. tunjangan transportasi.</p> <p>(2) Tunjangan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan setiap bulan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).</p>	<p>(2) Tunjangan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan setiap bulan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).</p>	<p>(2) Tunjangan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD.</p> <p>(3) Tunjangan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setiap bulan sebesar Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).</p> <p>(4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).</p>	<p>(6) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang.</p> <p>(7) Tunjangan perumahan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp20.012.000,00 (dua puluh juta dua belas ribu rupiah) setiap bulan.</p> <p>(8) Tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah) setiap bulan.</p>
			<p>Pasal 5A</p> <p>(1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.</p>

			<p>(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala Daerah/wakil kepala Daerah pada Daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.</p> <p>(3) Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.</p>
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.</p> <p>(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:</p> <p>a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian</p>	<p>Pasal 6: Tetap</p>	<p>Pasal 6: Tetap</p>	<p>Pasal 6: Tetap</p>

<p>sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;</p> <p>b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;</p> <p>c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;</p> <p>d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan</p> <p>e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.</p> <p>(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa</p>			
---	--	--	--

<p>pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.</p> <p>(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.</p>			
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:</p> <p>a. program, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyelenggaraan rapat; 2. kunjungan kerja; 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda; 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD; 	<p>Pasal 7: Tetap</p>	<p>Pasal 7: Tetap</p>	<p>Pasal 7: Tetap</p>

<p>5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan</p> <p>6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;</p> <p>b. dana operasional Pimpinan DPRD;</p> <p>c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;</p> <p>d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan</p> <p>e. belanja sekretariat fraksi.</p> <p>(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
<p>Pasal 8</p> <p>Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 8: Tetap</p>	<p>Pasal 8: Tetap</p>	<p>Pasal 8: Tetap</p>
<p>Pasal 9</p> <p>(3) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>	<p>Pasal 9: Tetap</p>	<p>Pasal 9: Tetap</p>	<p>Pasal 9: Tetap</p>

<p>7 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sebesar :</p> <p>a. Ketua, paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).</p> <p>b. Wakil Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD atau sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).</p> <p>(4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:</p> <p>a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan</p>			
---	--	--	--

<p>b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.</p>			
<p>Pasal 10 Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.</p>	<p>Pasal 10: Tetap</p>	<p>Pasal 10: Tetap</p>	<p>Pasal 10: Tetap</p>
<p>Pasal 11 (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan</p>	<p>Pasal 11: Tetap</p>	<p>Pasal 11: Tetap</p>	<p>Pasal 11: Tetap</p>

<p>DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Standarisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>			
<p>Pasal 12</p> <p>(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p>	<p>Pasal 12: Tetap</p>	<p>Pasal 12: Tetap</p>	<p>Pasal 12: Tetap</p>

<p>(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standarisasi Belanja Pegawai.</p> <p>(4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
<p>Pasal 13</p> <p>(1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 13: Tetap</p>	<p>Pasal 13: Tetap</p>	<p>Pasal 13: Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.</p>	<p>Pasal 14: Tetap</p>	<p>Pasal 14: Tetap</p>	<p>Pasal 14: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p>	<p>Pasal 15: Tetap</p>	<p>Pasal 15: Tetap</p>	<p>Pasal 15: Tetap</p>

<p>(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban penggunaan DO Pimpinan DPRD dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. Untuk dana operasional pimpinan DPRD yang diberikan dengan ketentuan sebesar 80 % (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 (satu) huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional pimpinan DPRD;</p> <p>b. Untuk dukungan dana operasional pimpinan DPRD lainnya yang diberikan ketentuan 20 % (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b, disertai</p>			
---	--	--	--

<p>dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.</p> <p>(3) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagaimana tambahan DO bulan berjalan.</p> <p>(5) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.</p>			
<p>Pasal 16</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2017.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan</p>	<p>Pasal 16: Tetap</p>	<p>Pasal 16: Tetap</p>	<p>Pasal 16: Tetap</p>

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.			
	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>
<p>Ditetapkan di Penajam Paser Utara pada tanggal 13 November 2017</p> <p>BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p>Ttd</p> <p>YUSRAN ASPAR</p>	<p>Ditetapkan di Penajam Paser Utara pada tanggal 27 Maret 2018</p> <p>BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p>Ttd</p> <p>YUSRAN ASPAR</p>	<p>Ditetapkan di Penajam Paser Utara pada tanggal 27 Oktober 2021</p> <p>BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p>Ttd</p> <p>ABDUL GAFUR MAS'UD</p>	<p>Ditetapkan di Penajam Paser Utara pada tanggal 26 Maret 2024</p> <p>BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p>Ttd</p> <p>MAKMUR MARBUN</p>
<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 13 November 2017</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,</p> <p>Ttd</p> <p>TOHAR</p>	<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 27 Maret 2018</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,</p> <p>Ttd</p> <p>TOHAR</p>	<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 27 Oktober 2021</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,</p> <p>Ttd</p> <p>MULIADI</p>	<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 26 Maret 2024</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,</p> <p>Ttd</p> <p>TOHAR</p>

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 61.	BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 4.	BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 36.	BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 12.
--	---	--	--